



Katalog BPS : 7203005.33

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH 2012-2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH 2012-2013



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH 2012-2013

ISBN : 978-602-0916-22-4
Katalog BPS : 7203005.33
No. Publikasi : 33542.1404
Ukuran Buku : 21 cm x 29,5 cm
Jumlah Halaman : ix + 87 halaman

Naskah:
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Sampul:
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2012– 2013 merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Buku ini memberi gambaran Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berguna sebagai sumber informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas. Di samping itu, data yang tersaji dalam publikasi ini juga dapat digunakan untuk melengkapi berbagai keperluan penyusunan statistik, misalnya untuk keperluan penghitungan Pendapatan Nasional/Regional, Neraca Sektor Publik, Tabel Input - Output dan lain-lain.

Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari instansi Biro/Bagian Keuangan Kantor Gubernur/Bupati/Walikota di Jawa Tengah yang dikumpulkan oleh petugas BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan menggunakan daftar yang khusus disusun oleh BPS RI.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat dihargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Semarang, November 2014
Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

Drs. Ibram Syahboedin, MA

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
II. KONSEP dan DEFINISI	3
2.1. Anggaran/Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi	3
2.1.1. Pendapatan Daerah	3
2.1.2. Belanja Daerah	6
2.2. Anggaran/Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	9
2.3. Anggaran/Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	11
2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	11
2.3.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	12
LAMPIRAN (TABEL-TABEL)	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	14
Tabel 2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	15
Tabel 3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 - 2013	16
Tabel 4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	17
Tabel 5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	18
Tabel 6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	19
Tabel 7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	20
Tabel 8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	21
Tabel 9	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	22
Tabel 10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	23
Tabel 11	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	24
Tabel 12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	25
Tabel 13	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	26
Tabel 14	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	27

Tabel 15	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	28
Tabel 16	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	29
Tabel 17	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	30
Tabel 18	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	31
Tabel 19	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	32
Tabel 20	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	33
Tabel 21	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	34
Tabel 22	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	35
Tabel 23	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	36
Tabel 24	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	37
Tabel 25	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	38
Tabel 26	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	39
Tabel 27	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	40
Tabel 28	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	41
Tabel 29	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	42

Tabel 30	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	43
Tabel 31	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	44
Tabel 32	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	45
Tabel 33	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	46
Tabel 34	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	47
Tabel 35	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	48
Tabel 36	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	49
Tabel 37	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	50
Tabel 38	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	51
Tabel 39	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	52
Tabel 40	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	53
Tabel 41	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	54
Tabel 42	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	55
Tabel 43	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	56
Tabel 44	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	57

Tabel 45	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	58
Tabel 46	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	59
Tabel 47	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	60
Tabel 48	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	61
Tabel 49	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	62
Tabel 50	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	63
Tabel 51	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	64
Tabel 52	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	65
Tabel 53	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	66
Tabel 54	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	67
Tabel 55	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	68
Tabel 56	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	69
Tabel 57	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	70
Tabel 58	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	71
Tabel 59	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	72

Tabel 60	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	73
Tabel 61	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	74
Tabel 62	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	75
Tabel 63	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	76
Tabel 64	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	77
Tabel 65	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	78
Tabel 66	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	79
Tabel 67	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	80
Tabel 68	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	81
Tabel 69	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	82
Tabel 70	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	83
Tabel 71	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	84
Tabel 72	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	85
Tabel 73	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012 – 2013	86
Tabel 74	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012 – 2013	87

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Diharapkan dengan adanya kewenangan tersebut daerah otonom dapat memperoleh sumber pembiayaan dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga merupakan kewajiban yang harus dibuat setiap akhir pelaksanaan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

1.2. TUJUAN

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.3. RUANG LINGKUP

Survei ini dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota se Jawa Tengah atau dengan kata lain pencacahan dilakukan secara lengkap di 35 Kabupaten/Kota dan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang dikumpulkan hanya sebatas mengenai Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

I. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan Definisi serta Format daftar pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data Statistik Keuangan Pemerintah mengacu pada format pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006.

2.1. ANGGARAN/REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain.

Rincian 2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a.1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

a.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Rincian 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.2. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Rincian 1 Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja tak langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Yang Telah Ditetapkan Undang-Undang

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal

outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

d. Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota

- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

h. Belanja Tak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rincian 2 Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

c. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adalah belanja daerah yang dirinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir.

Rincian 1 Pelayanan Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

Rincian 2 Ketertiban dan Keamanan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

Rincian 3 Ekonomi

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.

Rincian 4 Lingkungan Hidup

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

Rincian 5 Perumahan dan Fasilitas Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.

Rincian 6 Kesehatan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

Rincian 7 Pariwisata dan Budaya

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

Rincian 8 Pendidikan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.

Rincian 9 Perlindungan Sosial

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

2.3. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

2.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

6. Penerimaan Piutang Daerah.

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

2.3.2. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

LAMPIRAN

TABEL-TABEL

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2 012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	11 694 479 699	11 930 236 616
1.	Pendapatan Asli Daerah	6 629 308 010	6 625 624 955
1.1.	Pajak Daerah	5 590 597 156	5 483 987 700
1.2.	Retribusi Daerah	68 250 252	74 381 172
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	238 231 933	252 770 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	732 228 669	814 486 083
2.	Dana Perimbangan	2 318 806 100	2 420 344 820
2.1.	Bagi Hasil Pajak	610 215 375	666 962 941
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	141 067 324	0
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 516 892 951	1 670 859 369
2.4.	Dana Alokasi Khusus	50 630 450	82 522 510
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 746 365 589	2 884 266 841
B.	Pembiayaan Daerah	707 735 960	800 000 000
Jumlah		12 402 215 659	12 730 236 616

*) *Data APBD*

Tabel 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	8 540 012 837	9 218 308 025
1. Belanja Pegawai	1 241 600 972	1 546 700 206
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	3 123 911 500	3 978 087 983
5. Belanja Bantuan Sosial	7 548 325	11 862 100
6. Belanja Bagi Hasil	2 253 337 259	2 206 450 468
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 908 190 238	1 437 313 268
8. Pengeluaran Tidak Terduga	5 424 543	37 894 000
B. Belanja Langsung	2 906 831 268	3 511 928 591
1. Belanja Pegawai	318 033 645	386 929 259
2. Belanja Barang dan Jasa	1 977 523 313	2 128 949 800
3. Belanja Modal	611 274 310	996 049 532
C. Pembiayaan Daerah	955 371 554	0
Jumlah	12 402 215 659	12 730 236 616

*) Data APBD

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota
Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan
(ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	43 185 700 801	44 973 603 631
1. Pendapatan Asli Daerah	4 887 191 503	4 722 087 807
1.1. Pajak Daerah	1 670 386 878	1 776 965 173
1.2. Retribusi Daerah	825 589 528	828 061 119
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	210 147 533	209 025 524
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	2 181 067 564	1 908 035 991
2. Dana Perimbangan	29 327 913 335	31 543 784 790
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 878 181 986	1 318 906 422
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	184 290 320	239 267 102
2.3. Dana Alokasi Umum	24 867 566 879	27 839 032 536
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 397 874 150	2 146 578 730
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	8 970 595 963	8 707 731 034
B. Pembiayaan Daerah	3 972 821 618	3 388 818 421
Jumlah	47 158 522 419	48 362 422 052
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota
Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran
(ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	26 919 437 914	30 464 635 169
1. Belanja Pegawai	23 823 952 803	26 871 868 223
2. Belanja Bunga	5 859 662	7 495 839
3. Belanja Subsidi	4 834 729	2 664 389
4. Belanja Hibah	1 170 725 091	1 374 024 538
5. Belanja Bantuan Sosial	407 403 028	322 907 250
6. Belanja Bagi Hasil	51 686 181	54 639 468
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 405 758 653	1 673 482 413
8. Pengeluaran Tidak Terduga	49 217 767	157 553 049
B. Belanja Langsung	14 139 910 411	17 310 840 173
1. Belanja Pegawai	1 361 501 435	1 598 390 619
2. Belanja Barang dan Jasa	6 145 685 844	7 507 567 890
3. Belanja Modal	6 632 723 132	8 204 881 664
C. Pembiayaan Daerah	6 099 174 094	586 946 710
Jumlah	47 158 522 419	48 362 422 052

*) *Data APBD*

Tabel 5 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 792 439 255	1 976 248 662
1.	Pendapatan Asli Daerah	196 673 443	191 852 564
1.1.	Pajak Daerah	64 773 402	78 915 581
1.2.	Retribusi Daerah	45 566 294	19 910 718
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 242 734	7 727 392
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	79 091 013	85 298 873
2.	Dana Perimbangan	1 250 042 117	1 368 102 208
2.1.	Bagi Hasil Pajak	100 897 085	59 540 585
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 684 559	3 089 213
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 057 808 013	1 197 315 060
2.4.	Dana Alokasi Khusus	87 652 460	108 157 350
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	345 723 695	416 293 890
B.	Pembiayaan Daerah	308 188 938	153 759 054
Jumlah		2 100 628 193	2 130 007 716
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 6 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 190 456 035	1 411 245 666
1. Belanja Pegawai	960 586 641	1 128 175 577
2. Belanja Bunga	28 477	53 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	146 321 960	166 105 066
5. Belanja Bantuan Sosial	4 674 040	3 398 000
6. Belanja Bagi Hasil	387 569	431 723
7. Belanja Bantuan Keuangan	77 906 439	108 082 300
8. Pengeluaran Tidak Terduga	550 909	5 000 000
B. Belanja Langsung	602 130 794	661 995 416
1. Belanja Pegawai	79 118 658	88 730 966
2. Belanja Barang dan Jasa	214 140 027	248 699 016
3. Belanja Modal	308 872 109	324 565 434
C. Pembiayaan Daerah	308 041 364	56 766 634
Jumlah	2 100 628 193	2 130 007 716

*) *Data APBD*

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 815 453 435	1 833 089 236
1.	Pendapatan Asli Daerah	242 106 509	229 194 361
1.1.	Pajak Daerah	54 752 317	71 741 980
1.2.	Retribusi Daerah	40 751 970	34 331 947
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 798 974	8 265 783
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	137 803 248	114 854 651
2.	Dana Perimbangan	1 197 890 395	1 255 985 957
2.1.	Bagi Hasil Pajak	81 883 222	45 092 084
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 160 383	4 292 143
2.3.	Dana Alokasi Umum	991 945 010	1 127 939 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus	118 901 780	78 662 730
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	375 456 531	347 908 918
B.	Pembiayaan Daerah	264 753 792	275 901 867
Jumlah		2 080 207 227	2 108 991 103
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 8 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 154 739 729	1 282 717 720
1. Belanja Pegawai	1 051 551 533	1 148 585 820
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	41 347 991	58 049 713
5. Belanja Bantuan Sosial	7 059 350	6 515 180
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	54 459 984	67 067 007
8. Pengeluaran Tidak Terduga	320 871	2 500 000
B. Belanja Langsung	577 496 539	815 726 383
1. Belanja Pegawai	57 221 084	65 148 510
2. Belanja Barang dan Jasa	285 323 422	341 120 807
3. Belanja Modal	234 952 033	409 457 066
C. Pembiayaan Daerah	347 970 959	10 547 000
Jumlah	2 080 207 227	2 108 991 103
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 9 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2 012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 087 711 436	1 119 615 028
1.	Pendapatan Asli Daerah	112 727 617	101 375 796
1.1.	Pajak Daerah	19 432 288	16 757 000
1.2.	Retribusi Daerah	27 425 984	28 192 269
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 307 015	9 282 563
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	59 562 330	47 143 964
2.	Dana Perimbangan	757 604 355	830 725 884
2.1.	Bagi Hasil Pajak	36 221 468	38 434 147
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 130 772	6 465 657
2.3.	Dana Alokasi Umum	640 265 475	719 185 020
2.4.	Dana Alokasi Khusus	75 986 640	66 641 060
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	217 379 464	187 513 348
B.	Pembiayaan Daerah	86 469 724	16 145 670
Jumlah		1 174 181 160	1 135 760 698
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 10 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2 012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	672 609 303	721 067 900
1. Belanja Pegawai	599 311 055	642 670 593
2. Belanja Bunga	32 361	24 688
3. Belanja Subsidi	646 483	400 000
4. Belanja Hibah	13 174 399	13 401 331
5. Belanja Bantuan Sosial	7 273 379	8 970 250
6. Belanja Bagi Hasil	168 834	17 500
7. Belanja Bantuan Keuangan	50 539 658	53 583 538
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 463 134	2 000 000
B. Belanja Langsung	411 629 764	406 314 076
1. Belanja Pegawai	27 674 690	30 587 163
2. Belanja Barang dan Jasa	257 281 623	249 816 520
3. Belanja Modal	126 673 451	125 910 393
C. Pembiayaan Daerah	89 942 093	8 378 722
Jumlah	1 174 181 160	1 135 760 698

*) Data APBD

Tabel 11 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 193 098 804	1 188 465 870
1.	Pendapatan Asli Daerah	94 271 468	76 518 412
1.1.	Pajak Daerah	13 613 380	12 411 000
1.2.	Retribusi Daerah	25 209 610	23 741 787
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 611 972	4 543 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	46 836 506	35 822 625
2.	Dana Perimbangan	794 742 432	875 159 298
2.1.	Bagi Hasil Pajak	44 575 703	41 873 538
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 039 955	376 564
2.3.	Dana Alokasi Umum	681 395 924	763 426 566
2.4.	Dana Alokasi Khusus	67 730 850	69 482 630
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	304 084 904	236 788 160
B.	Pembiayaan Daerah	98 119 743	51 958 100
Jumlah		1 291 218 547	1 240 423 970
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 12 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2 012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	737 973 515	849 667 703
1. Belanja Pegawai	659 051 815	769 641 892
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	33 276 897	30 612 438
5. Belanja Bantuan Sosial	10 192 900	8 410 000
6. Belanja Bagi Hasil	490 443	530 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	34 851 835	36 973 373
8. Pengeluaran Tidak Terduga	109 625	3 500 000
B. Belanja Langsung	373 171 847	385 296 267
1. Belanja Pegawai	24 364 186	39 161 593
2. Belanja Barang dan Jasa	190 506 822	183 037 463
3. Belanja Modal	158 300 839	163 097 211
C. Pembiayaan Daerah	180 073 185	5 460 000
Jumlah	1 291 218 547	1 240 423 970
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 13 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 446 685 447	1 597 037 532
1.	Pendapatan Asli Daerah	102 374 370	104 721 559
1.1.	Pajak Daerah	20 375 075	33 965 900
1.2.	Retribusi Daerah	24 787 134	26 355 662
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 822 777	5 555 647
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	50 389 384	38 844 350
2.	Dana Perimbangan	1 056 314 659	1 133 746 826
2.1.	Bagi Hasil Pajak	49 029 790	30 347 391
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	959 532	2 464 395
2.3.	Dana Alokasi Umum	906 222 007	1 021 871 180
2.4.	Dana Alokasi Khusus	100 103 330	79 063 860
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	287 996 418	358 569 147
B.	Pembiayaan Daerah	84 583 470	44 771 960
Jumlah		1 531 268 917	1 641 809 492
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 14 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	961 565 753	1 207 041 371
1. Belanja Pegawai	880 803 165	982 460 747
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	3 600 696	111 838 948
5. Belanja Bantuan Sosial	23 886 913	40 565 154
6. Belanja Bagi Hasil	2 188 055	2 373 540
7. Belanja Bantuan Keuangan	51 086 924	68 150 614
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	1 652 368
B. Belanja Langsung	450 931 236	427 418 121
1. Belanja Pegawai	39 982 212	45 378 407
2. Belanja Barang dan Jasa	115 740 020	127 344 264
3. Belanja Modal	295 209 004	254 695 450
C. Pembiayaan Daerah	118 771 928	7 350 000
Jumlah	1 531 268 917	1 641 809 492
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 15 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 167 943 577	1 201 331 162
1.	Pendapatan Asli Daerah	98 262 003	109 487 990
1.1.	Pajak Daerah	12 114 227	29 039 915
1.2.	Retribusi Daerah	14 620 639	14 628 619
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 120 005	3 928 400
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	68 407 132	61 891 056
2.	Dana Perimbangan	828 200 750	875 620 184
2.1.	Bagi Hasil Pajak	41 344 641	23 714 292
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 545 870	4 678 193
2.3.	Dana Alokasi Umum	711 741 839	793 904 679
2.4.	Dana Alokasi Khusus	69 568 400	53 323 020
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	241 480 824	216 222 988
B.	Pembiayaan Daerah	115 892 130	63 697 425
Jumlah		1 283 835 707	1 265 028 587
*)	Data APBD		

Tabel 16 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	815 095 678	913 335 787
1. Belanja Pegawai	741 354 183	819 010 786
2. Belanja Bunga	72 834	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	23 567 836	12 608 265
5. Belanja Bantuan Sosial	4 471 431	8 695 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	3 600 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	42 539 997	54 533 717
8. Pengeluaran Tidak Terduga	3 089 397	14 888 019
B. Belanja Langsung	311 035 162	345 229 800
1. Belanja Pegawai	37 179 502	40 712 535
2. Belanja Barang dan Jasa	124 750 741	140 325 153
3. Belanja Modal	149 104 919	164 192 112
C. Pembiayaan Daerah	157 704 867	6 463 000
Jumlah	1 283 835 707	1 265 028 587

*) Data APBD

Tabel 17 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 031 047 908	1 028 177 894
1.	Pendapatan Asli Daerah	82 335 296	72 795 288
1.1.	Pajak Daerah	9 441 194	15 850 000
1.2.	Retribusi Daerah	17 622 354	15 224 586
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 728 450	5 212 852
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	50 543 298	36 507 850
2.	Dana Perimbangan	697 594 307	745 778 034
2.1.	Bagi Hasil Pajak	35 564 420	14 200 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 201 133	8 080 000
2.3.	Dana Alokasi Umum	597 858 484	665 548 034
2.4.	Dana Alokasi Khusus	55 970 270	57 950 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	251 118 305	209 604 572
B.	Pembiayaan Daerah	117 573 985	78 692 250
Jumlah		1 148 621 893	1 106 870 144
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 18 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	606 980 926	665 724 070
1. Belanja Pegawai	541 754 405	594 334 492
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	15 543 085	16 622 578
5. Belanja Bantuan Sosial	3 119 980	1 311 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	44 593 569	51 056 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 969 887	2 400 000
B. Belanja Langsung	379 555 988	435 146 074
1. Belanja Pegawai	6 623 304	9 909 086
2. Belanja Barang dan Jasa	183 465 534	197 776 094
3. Belanja Modal	189 467 150	227 460 894
C. Pembiayaan Daerah	162 084 979	6 000 000
Jumlah	1 148 621 893	1 106 870 144

*) *Data APBD*

Tabel 19 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 311 901 799	1 324 510 150
1. Pendapatan Asli Daerah	123 722 781	124 151 949
1.1. Pajak Daerah	42 915 499	48 367 847
1.2. Retribusi Daerah	25 022 657	30 269 574
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 060 433	8 936 752
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	46 724 192	36 577 776
2. Dana Perimbangan	979 144 364	1 004 486 994
2.1. Bagi Hasil Pajak	57 854 911	34 039 712
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	961 669	10 848 043
2.3. Dana Alokasi Umum	816 732 604	889 528 369
2.4. Dana Alokasi Khusus	103 595 180	70 070 870
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	209 034 654	195 871 207
B. Pembiayaan Daerah	163 829 687	189 113 417
Jumlah	1 475 731 486	1 513 623 567
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 20 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	869 455 957	968 924 384
1. Belanja Pegawai	759 025 290	847 660 256
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	30 151 897	38 633 877
5. Belanja Bantuan Sosial	2 801 150	2 332 500
6. Belanja Bagi Hasil	661 620	972 089
7. Belanja Bantuan Keuangan	73 301 757	74 825 662
8. Pengeluaran Tidak Terduga	3 514 243	4 500 000
B. Belanja Langsung	277 044 083	542 804 183
1. Belanja Pegawai	25 620 505	37 138 518
2. Belanja Barang dan Jasa	156 072 760	225 739 502
3. Belanja Modal	95 350 818	279 926 163
C. Pembiayaan Daerah	329 231 446	1 895 000
Jumlah	1 475 731 486	1 513 623 567

*) *Data APBD*

Tabel 21 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 271 240 332	1 355 583 505
1.	Pendapatan Asli Daerah	127 725 207	142 676 533
1.1.	Pajak Daerah	23 282 496	33 917 773
1.2.	Retribusi Daerah	36 721 244	38 759 365
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 509 165	5 509 166
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	62 212 302	64 490 229
2.	Dana Perimbangan	893 578 301	967 113 761
2.1.	Bagi Hasil Pajak	51 794 975	35 211 011
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 120 780	983 269
2.3.	Dana Alokasi Umum	780 301 856	871 685 981
2.4.	Dana Alokasi Khusus	60 360 690	59 233 500
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	249 936 824	245 793 211
B.	Pembiayaan Daerah	80 875 671	73 721 802
Jumlah		1 352 116 003	1 429 305 307
*)	Data APBD		

Tabel 22 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	886 448 918	965 968 878
1. Belanja Pegawai	777 598 506	831 962 632
2. Belanja Bunga	11 826	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	41 761 915	54 099 595
5. Belanja Bantuan Sosial	5 070 133	3 432 500
6. Belanja Bagi Hasil	2 950 388	94 351
7. Belanja Bantuan Keuangan	59 056 150	74 379 800
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	382 777 895	456 921 429
1. Belanja Pegawai	32 350 318	28 569 087
2. Belanja Barang dan Jasa	142 669 010	179 493 474
3. Belanja Modal	207 758 567	248 858 868
C. Pembiayaan Daerah	82 889 190	6 415 000
Jumlah	1 352 116 003	1 429 305 307

*) Data APBD

Tabel 23 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 511 542 005	1 564 769 434
1.	Pendapatan Asli Daerah	84 755 835	82 921 358
1.1.	Pajak Daerah	30 472 345	35 525 000
1.2.	Retribusi Daerah	19 209 149	23 648 858
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 058 530	4 916 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	31 015 811	18 831 500
2.	Dana Perimbangan	1 098 162 418	1 168 763 283
2.1.	Bagi Hasil Pajak	43 675 340	30 870 290
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	12 700 719	10 399 146
2.3.	Dana Alokasi Umum	967 284 829	1 066 318 427
2.4.	Dana Alokasi Khusus	74 501 530	61 175 420
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	328 623 752	313 084 793
B.	Pembiayaan Daerah	113 514 996	79 715 456
Jumlah		1 625 057 001	1 644 484 890
*) Data APBD			

Tabel 24 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 086 669 202	1 251 486 937
1. Belanja Pegawai	998 239 459	1 115 667 957
2. Belanja Bunga	259 928	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	9 926 338	16 808 800
5. Belanja Bantuan Sosial	13 607 845	11 563 510
6. Belanja Bagi Hasil	461 689	574 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	64 086 760	83 496 977
8. Pengeluaran Tidak Terduga	87 183	23 375 693
B. Belanja Langsung	352 949 961	376 997 953
1. Belanja Pegawai	18 292 831	23 422 938
2. Belanja Barang dan Jasa	152 049 762	171 772 341
3. Belanja Modal	182 607 368	181 802 674
C. Pembiayaan Daerah	185 437 838	16 000 000
Jumlah	1 625 057 001	1 644 484 890

*) Data APBD

Tabel 25 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 217 485 978	1 217 966 187
1.	Pendapatan Asli Daerah	164 954 319	154 067 833
1.1.	Pajak Daerah	85 704 497	79 205 000
1.2.	Retribusi Daerah	22 461 598	23 828 792
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 416 537	5 262 991
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	52 371 687	45 771 050
2.	Dana Perimbangan	760 615 714	851 119 255
2.1.	Bagi Hasil Pajak	28 499 612	30 566 974
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4 264 783	3 964 701
2.3.	Dana Alokasi Umum	680 235 009	763 462 900
2.4.	Dana Alokasi Khusus	47 616 310	53 124 680
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	291 915 945	212 779 099
B.	Pembiayaan Daerah	121 138 925	63 503 223
Jumlah		1 338 624 903	1 281 469 410
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 26 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	775 259 142	844 042 406
1. Belanja Pegawai	678 730 940	734 833 036
2. Belanja Bunga	47 004	35 858
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	49 361 390	48 180 802
5. Belanja Bantuan Sosial	7 565 132	10 000 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	38 957 394	44 961 096
8. Pengeluaran Tidak Terduga	597 282	6 031 614
B. Belanja Langsung	421 540 119	430 269 451
1. Belanja Pegawai	59 112 393	72 360 203
2. Belanja Barang dan Jasa	128 703 838	155 350 687
3. Belanja Modal	233 723 888	202 558 561
C. Pembiayaan Daerah	141 825 642	7 157 553
Jumlah	1 338 624 903	1 281 469 410

*) *Data APBD*

Tabel 27 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 341 193 893	1 418 726 257
1.	Pendapatan Asli Daerah	101 421 893	87 845 022
1.1.	Pajak Daerah	12 028 974	9 968 000
1.2.	Retribusi Daerah	21 221 137	23 943 623
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 926 134	6 534 523
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	62 245 648	47 398 876
2.	Dana Perimbangan	948 633 443	1 038 703 467
2.1.	Bagi Hasil Pajak	44 019 541	44 538 856
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 082 274	982 164
2.3.	Dana Alokasi Umum	828 479 528	917 476 557
2.4.	Dana Alokasi Khusus	75 052 100	75 705 890
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	291 138 557	292 177 768
B.	Pembiayaan Daerah	155 292 956	103 713 896
Jumlah		1 496 486 849	1 522 440 153
*)	Data APBD		

Tabel 28 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	965 323 435	1 095 277 634
1. Belanja Pegawai	860 211 381	978 297 272
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	86 994	611 804
4. Belanja Hibah	25 695 730	19 390 450
5. Belanja Bantuan Sosial	4 340 000	3 850 000
6. Belanja Bagi Hasil	23 016 940	24 394 608
7. Belanja Bantuan Keuangan	49 806 746	64 916 230
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 165 644	3 817 270
B. Belanja Langsung	350 622 035	415 532 519
1. Belanja Pegawai	29 804 257	42 593 828
2. Belanja Barang dan Jasa	135 003 339	178 678 319
3. Belanja Modal	185 814 439	194 260 372
C. Pembiayaan Daerah	180 541 379	11 630 000
Jumlah	1 496 486 849	1 522 440 153
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 29 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 228 675 436	1 274 579 906
1.	Pendapatan Asli Daerah	116 706 893	121 180 202
1.1.	Pajak Daerah	45 658 231	51 176 761
1.2.	Retribusi Daerah	15 646 685	18 419 351
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 039 677	9 557 375
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	51 362 300	42 026 715
2.	Dana Perimbangan	837 078 140	882 003 566
2.1.	Bagi Hasil Pajak	47 296 050	9 731 885
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 349 168	6 852 039
2.3.	Dana Alokasi Umum	720 918 512	810 216 582
2.4.	Dana Alokasi Khusus	55 514 410	55 203 060
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	274 890 403	271 396 138
B.	Pembiayaan Daerah	122 690 697	72 238 179
Jumlah		1 351 366 133	1 346 818 085
*)	Data APBD		

Tabel 30 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	902 400 901	1 042 528 825
1. Belanja Pegawai	761 587 478	916 820 430
2. Belanja Bunga	168 044	70 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	8 783 788	67 743 283
5. Belanja Bantuan Sosial	87 245 467	7 408 700
6. Belanja Bagi Hasil	1 999 989	2 000 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	41 846 558	45 986 412
8. Pengeluaran Tidak Terduga	769 577	2 500 000
B. Belanja Langsung	270 804 788	303 660 260
1. Belanja Pegawai	40 072 037	48 219 416
2. Belanja Barang dan Jasa	107 971 329	128 558 343
3. Belanja Modal	122 761 422	126 882 501
C. Pembiayaan Daerah	178 160 444	629 000
Jumlah	1 351 366 133	1 346 818 085

*) *Data APBD*

Tabel 31 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 308 940 382	1 383 879 098
1.	Pendapatan Asli Daerah	127 695 844	105 574 126
1.1.	Pajak Daerah	22 662 312	20 542 333
1.2.	Retribusi Daerah	21 169 084	20 217 016
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 533 383	7 333 539
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	75 331 065	57 481 238
2.	Dana Perimbangan	890 241 507	975 950 381
2.1.	Bagi Hasil Pajak	41 278 020	44 089 093
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	917 172	848 183
2.3.	Dana Alokasi Umum	778 668 035	869 155 545
2.4.	Dana Alokasi Khusus	69 378 280	61 857 560
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	291 003 031	302 354 591
B.	Pembiayaan Daerah	91 583 990	0
Jumlah		1 400 524 372	1 383 879 098
*) <i>Data APBD</i>			

Tabel 32 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	888 782 237	1 053 127 350
1. Belanja Pegawai	797 916 723	922 336 286
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	35 573 457	40 666 977
5. Belanja Bantuan Sosial	9 936 487	18 696 138
6. Belanja Bagi Hasil	699 660	873 600
7. Belanja Bantuan Keuangan	44 170 872	41 771 582
8. Pengeluaran Tidak Terduga	485 038	28 782 767
B. Belanja Langsung	308 651 836	325 051 748
1. Belanja Pegawai	20 414 323	23 585 460
2. Belanja Barang dan Jasa	162 731 242	198 628 311
3. Belanja Modal	125 506 271	102 837 977
C. Pembiayaan Daerah	203 090 299	5 700 000
Jumlah	1 400 524 372	1 383 879 098

*) *Data APBD*

Tabel 33 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 323 837 610	1 450 053 240
1.	Pendapatan Asli Daerah	105 463 320	101 116 554
1.1.	Pajak Daerah	18 690 719	26 054 236
1.2.	Retribusi Daerah	15 134 903	10 426 189
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 712 724	10 782 151
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	64 924 974	53 853 978
2.	Dana Perimbangan	976 816 605	1 055 226 078
2.1.	Bagi Hasil Pajak	64 904 650	42 952 715
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 866 195	1 302 558
2.3.	Dana Alokasi Umum	812 990 740	906 666 365
2.4.	Dana Alokasi Khusus	97 055 020	104 304 440
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	241 557 685	293 710 608
B.	Pembiayaan Daerah	37 346 713	105 742 975
Jumlah		1 361 184 323	1 555 796 215
*) Data APBD			

Tabel 34 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	786 954 166	895 705 189
1. Belanja Pegawai	713 945 516	820 271 090
2. Belanja Bunga	47 178	47 179
3. Belanja Subsidi	300 000	428 500
4. Belanja Hibah	29 530 354	20 882 660
5. Belanja Bantuan Sosial	12 746 595	15 401 860
6. Belanja Bagi Hasil	1 349 400	2 440 438
7. Belanja Bantuan Keuangan	28 544 692	33 980 555
8. Pengeluaran Tidak Terduga	490 431	2 252 907
B. Belanja Langsung	416 586 436	641 097 870
1. Belanja Pegawai	35 955 787	41 834 087
2. Belanja Barang dan Jasa	190 555 669	215 688 584
3. Belanja Modal	190 074 980	383 575 199
C. Pembiayaan Daerah	157 643 721	18 993 156
Jumlah	1 361 184 323	1 555 796 215

*) *Data APBD*

Tabel 35 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 127 249 999	1 238 973 126
1.	Pendapatan Asli Daerah	81 987 005	77 000 000
1.1.	Pajak Daerah	11 486 783	12 810 000
1.2.	Retribusi Daerah	8 817 557	9 878 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 758 248	6 170 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	55 924 417	48 142 000
2.	Dana Perimbangan	817 542 088	888 091 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak	74 248 121	65 128 003
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16 123 677	15 640 071
2.3.	Dana Alokasi Umum	673 180 530	753 830 036
2.4.	Dana Alokasi Khusus	53 989 760	53 492 890
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	227 720 906	273 882 126
B.	Pembiayaan Daerah	167 339 357	151 202 000
Jumlah		1 294 589 356	1 390 175 126
*)	Data APBD		

Tabel 36 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	737 333 589	911 143 126
1. Belanja Pegawai	632 326 182	768 796 126
2. Belanja Bunga	35 884	60 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	48 435 593	49 739 000
5. Belanja Bantuan Sosial	3 200 500	4 727 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	47 623 145	82 284 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	5 712 285	5 537 000
B. Belanja Langsung	387 801 818	474 325 000
1. Belanja Pegawai	44 198 818	58 724 000
2. Belanja Barang dan Jasa	124 495 000	138 035 000
3. Belanja Modal	219 108 000	277 566 000
C. Pembiayaan Daerah	169 453 949	4 707 000
Jumlah	1 294 589 356	1 390 175 126
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 37 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 017 133 407	1 108 077 978
1.	Pendapatan Asli Daerah	102 727 487	110 867 345
1.1.	Pajak Daerah	21 691 251	24 002 000
1.2.	Retribusi Daerah	26 023 155	23 877 796
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 318 451	5 500 106
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	51 694 630	57 487 443
2.	Dana Perimbangan	692 398 154	734 617 850
2.1.	Bagi Hasil Pajak	41 438 403	35 753 546
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 154 143	1 819 474
2.3.	Dana Alokasi Umum	570 454 948	640 273 360
2.4.	Dana Alokasi Khusus	78 350 660	56 771 470
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	222 007 766	262 592 783
B.	Pembiayaan Daerah	0	18 954 890
Jumlah		1 017 133 407	1 127 032 868
*)	Data APBD		

Tabel 38 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	599 258 291	709 626 224
1. Belanja Pegawai	521 270 930	627 627 141
2. Belanja Bunga	22 383	37 000
3. Belanja Subsidi	700 000	723 000
4. Belanja Hibah	30 242 509	40 055 995
5. Belanja Bantuan Sosial	11 945 766	6 342 338
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	34 088 248	33 840 750
8. Pengeluaran Tidak Terduga	988 455	1 000 000
B. Belanja Langsung	363 179 144	412 151 644
1. Belanja Pegawai	52 494 932	59 279 640
2. Belanja Barang dan Jasa	112 321 210	168 454 346
3. Belanja Modal	198 363 002	184 417 658
C. Pembiayaan Daerah	54 695 972	5 255 000
Jumlah	1 017 133 407	1 127 032 868

*) Data APBD

Tabel 39 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 477 993 190	1 594 792 224
1.	Pendapatan Asli Daerah	163 733 664	134 961 821
1.1.	Pajak Daerah	25 002 619	23 420 000
1.2.	Retribusi Daerah	29 379 826	29 594 821
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 692 745	5 735 475
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	103 658 474	76 211 525
2.	Dana Perimbangan	997 544 585	1 085 387 490
2.1.	Bagi Hasil Pajak	65 439 436	50 848 387
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 278 918	1 156 407
2.3.	Dana Alokasi Umum	850 377 211	960 479 326
2.4.	Dana Alokasi Khusus	80 449 020	72 903 370
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	316 714 941	374 442 913
B.	Pembiayaan Daerah	166 706 789	204 993 708
Jumlah		1 644 699 979	1 799 785 932
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 40 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	957 971 514	1 174 837 987
1. Belanja Pegawai	823 229 195	1 035 009 442
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	47 311 450	45 436 822
5. Belanja Bantuan Sosial	14 590 460	5 572 510
6. Belanja Bagi Hasil	3 900 452	3 080 589
7. Belanja Bantuan Keuangan	68 939 957	82 852 828
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 885 796
B. Belanja Langsung	467 740 025	600 506 945
1. Belanja Pegawai	39 189 071	46 474 455
2. Belanja Barang dan Jasa	254 400 828	300 821 055
3. Belanja Modal	174 150 126	253 211 435
C. Pembiayaan Daerah	218 988 440	24 441 000
Jumlah	1 644 699 979	1 799 785 932

*) *Data APBD*

Tabel 41 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 147 302 763	1 333 610 814
1.	Pendapatan Asli Daerah	121 017 027	138 912 024
1.1.	Pajak Daerah	38 572 030	50 392 794
1.2.	Retribusi Daerah	13 865 925	20 609 924
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 633 796	4 505 015
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	63 945 276	63 404 291
2.	Dana Perimbangan	825 555 159	930 992 277
2.1.	Bagi Hasil Pajak	76 097 097	68 306 254
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	53 495 930	91 070 208
2.3.	Dana Alokasi Umum	637 615 372	719 406 935
2.4.	Dana Alokasi Khusus	58 346 760	52 208 880
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	200 730 577	263 706 513
B.	Pembiayaan Daerah	112 097 422	197 196 024
Jumlah		1 259 400 185	1 530 806 838
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 42 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	683 900 756	812 628 183
1. Belanja Pegawai	580 192 246	706 525 298
2. Belanja Bunga	1 054 653	70 802
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	38 878 555	35 526 645
5. Belanja Bantuan Sosial	26 663 285	24 938 887
6. Belanja Bagi Hasil	4 321 280	4 418 196
7. Belanja Bantuan Keuangan	30 919 777	39 148 355
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 870 960	2 000 000
B. Belanja Langsung	468 373 948	481 851 543
1. Belanja Pegawai	20 679 785	31 614 192
2. Belanja Barang dan Jasa	269 550 790	300 897 770
3. Belanja Modal	178 143 373	149 339 581
C. Pembiayaan Daerah	107 125 481	236 327 112
Jumlah	1 259 400 185	1 530 806 838

*) *Data APBD*

Tabel 43 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 304 004 471	1 255 015 542
1.	Pendapatan Asli Daerah	129 076 570	110 488 889
1.1.	Pajak Daerah	28 434 799	23 491 395
1.2.	Retribusi Daerah	13 600 890	13 258 336
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 640 566	5 749 917
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	82 400 315	67 989 241
2.	Dana Perimbangan	853 435 775	933 846 854
2.1.	Bagi Hasil Pajak	63 075 346	44 771 635
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 159 437	7 207 525
2.3.	Dana Alokasi Umum	712 740 462	814 380 324
2.4.	Dana Alokasi Khusus	76 460 530	67 487 370
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	321 492 126	210 679 799
B.	Pembiayaan Daerah	107 869 940	96 020 682
Jumlah		1 411 874 411	1 351 036 224
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 44 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	728 186 944	785 502 204
1. Belanja Pegawai	609 315 726	700 821 696
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	2 483 702	234 085
4. Belanja Hibah	57 879 453	26 293 500
5. Belanja Bantuan Sosial	18 411 600	6 354 500
6. Belanja Bagi Hasil	2 988 454	3 055 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	37 049 790	46 743 423
8. Pengeluaran Tidak Terduga	58 219	2 000 000
B. Belanja Langsung	568 889 768	565 534 020
1. Belanja Pegawai	36 372 435	24 497 896
2. Belanja Barang dan Jasa	235 320 051	354 080 389
3. Belanja Modal	297 197 282	186 955 735
C. Pembiayaan Daerah	114 797 699	0
Jumlah	1 411 874 411	1 351 036 224

*) *Data APBD*

Tabel 45 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 209 429 294	1 252 018 915
1.	Pendapatan Asli Daerah	105 363 371	100 414 761
1.1.	Pajak Daerah	31 742 813	40 063 745
1.2.	Retribusi Daerah	14 469 471	16 485 802
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 755 237	6 768 214
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	48 395 850	37 097 000
2.	Dana Perimbangan	797 462 367	864 869 877
2.1.	Bagi Hasil Pajak	46 234 484	40 219 401
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10 703 236	10 182 639
2.3.	Dana Alokasi Umum	658 971 337	737 911 647
2.4.	Dana Alokasi Khusus	81 553 310	76 556 190
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	306 603 556	286 734 277
B.	Pembiayaan Daerah	116 684 108	66 947 927
Jumlah		1 326 113 402	1 318 966 842
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 46 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	700 349 369	812 202 494
1. Belanja Pegawai	563 338 394	680 032 349
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	547 050	0
4. Belanja Hibah	74 838 180	72 239 245
5. Belanja Bantuan Sosial	6 077 041	1 165 000
6. Belanja Bagi Hasil	698 878	1 072 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	53 888 178	55 693 900
8. Pengeluaran Tidak Terduga	961 648	2 000 000
B. Belanja Langsung	508 217 583	500 264 348
1. Belanja Pegawai	27 648 992	33 813 517
2. Belanja Barang dan Jasa	141 550 731	171 023 426
3. Belanja Modal	339 017 860	295 427 405
C. Pembiayaan Daerah	117 546 450	6 500 000
Jumlah	1 326 113 402	1 318 966 842

*) *Data APBD*

Tabel 47 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 258 200 115	1 121 320 986
1.	Pendapatan Asli Daerah	156 104 005	166 505 503
1.1.	Pajak Daerah	47 192 969	62 055 063
1.2.	Retribusi Daerah	27 368 211	26 781 057
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 570 260	7 944 161
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	73 972 565	69 725 222
2.	Dana Perimbangan	809 788 381	861 582 741
2.1.	Bagi Hasil Pajak	49 807 422	23 001 440
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	972 176	862 911
2.3.	Dana Alokasi Umum	691 271 583	778 604 920
2.4.	Dana Alokasi Khusus	67 737 200	59 113 470
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	292 307 729	93 232 742
B.	Pembiayaan Daerah	98 257 806	19 771 777
Jumlah		1 356 457 921	1 141 092 763
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 48 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	742 773 505	647 903 948
1. Belanja Pegawai	668 218 122	583 940 022
2. Belanja Bunga	7 156	5 653
3. Belanja Subsidi	70 500	117 000
4. Belanja Hibah	25 621 117	7 643 030
5. Belanja Bantuan Sosial	10 660 579	2 254 000
6. Belanja Bagi Hasil	172 225	172 225
7. Belanja Bantuan Keuangan	36 701 224	51 272 018
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 322 582	2 500 000
B. Belanja Langsung	472 748 657	489 271 548
1. Belanja Pegawai	30 112 993	35 361 386
2. Belanja Barang dan Jasa	178 219 060	208 497 289
3. Belanja Modal	264 416 604	245 412 873
C. Pembiayaan Daerah	140 935 759	3 917 267
Jumlah	1 356 457 921	1 141 092 763

*) *Data APBD*

Tabel 49 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	966 815 574	991 506 970
1.	Pendapatan Asli Daerah	78 514 689	84 225 718
1.1.	Pajak Daerah	11 470 231	24 544 270
1.2.	Retribusi Daerah	14 038 793	13 654 385
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 555 592	9 057 063
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	43 450 073	36 970 000
2.	Dana Perimbangan	707 239 145	726 062 537
2.1.	Bagi Hasil Pajak	34 819 961	27 313 452
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	957 186	919 171
2.3.	Dana Alokasi Umum	584 158 278	651 171 674
2.4.	Dana Alokasi Khusus	87 303 720	46 658 240
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	181 061 740	181 218 715
B.	Pembiayaan Daerah	46 248 247	116 000 000
Jumlah		1 013 063 821	1 107 506 970
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 50 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	639 977 391	724 388 500
1. Belanja Pegawai	540 996 736	589 998 112
2. Belanja Bunga	0	1 380 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	40 922 374	57 244 051
5. Belanja Bantuan Sosial	14 132 312	23 309 441
6. Belanja Bagi Hasil	4 899 806	4 254 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	38 744 388	47 952 896
8. Pengeluaran Tidak Terduga	281 775	250 000
B. Belanja Langsung	316 346 769	378 118 470
1. Belanja Pegawai	32 489 153	35 481 192
2. Belanja Barang dan Jasa	121 777 499	138 007 138
3. Belanja Modal	162 080 117	204 630 140
C. Pembiayaan Daerah	56 739 661	5 000 000
Jumlah	1 013 063 821	1 107 506 970

*) Data APBD

Tabel 51 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 236 364 509	1 327 090 827
1.	Pendapatan Asli Daerah	120 162 136	107 394 730
1.1.	Pajak Daerah	34 623 033	28 541 000
1.2.	Retribusi Daerah	17 525 238	19 186 970
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 142 930	5 000 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	62 870 935	54 666 760
2.	Dana Perimbangan	845 851 037	921 516 585
2.1.	Bagi Hasil Pajak	77 678 303	54 071 164
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 579 626	19 917 653
2.3.	Dana Alokasi Umum	702 708 128	788 134 078
2.4.	Dana Alokasi Khusus	63 884 980	59 393 690
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	270 351 336	298 179 512
B.	Pembiayaan Daerah	82 762 359	72 835 527
Jumlah		1 319 126 868	1 399 926 354
*)	Data APBD		

Tabel 52 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	721 434 054	847 405 585
1. Belanja Pegawai	657 644 454	785 298 850
2. Belanja Bunga	88 891	175 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	11 991 595	4 051 000
5. Belanja Bantuan Sosial	6 732 083	6 419 350
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	44 048 714	47 961 385
8. Pengeluaran Tidak Terduga	928 317	3 500 000
B. Belanja Langsung	442 554 835	536 399 894
1. Belanja Pegawai	46 043 044	56 837 718
2. Belanja Barang dan Jasa	203 930 145	233 893 307
3. Belanja Modal	192 581 646	245 668 869
C. Pembiayaan Daerah	155 137 979	16 120 875
Jumlah	1 319 126 868	1 399 926 354

*) *Data APBD*

Tabel 53 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	933 943 658	990 365 980
1.	Pendapatan Asli Daerah	84 720 048	83 242 372
1.1.	Pajak Daerah	17 246 380	24 908 140
1.2.	Retribusi Daerah	16 303 638	14 927 567
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 367 435	4 275 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	45 802 595	39 131 665
2.	Dana Perimbangan	677 708 142	723 746 733
2.1.	Bagi Hasil Pajak	38 781 980	26 236 170
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 014 223	6 117 493
2.3.	Dana Alokasi Umum	577 238 039	641 663 630
2.4.	Dana Alokasi Khusus	54 673 900	49 729 440
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	171 515 468	183 376 875
B.	Pembiayaan Daerah	106 757 242	66 357 955
Jumlah		1 040 700 900	1 056 723 935
*)	Data APBD		

Tabel 54 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	591 981 648	659 764 767
1. Belanja Pegawai	507 933 400	560 153 611
2. Belanja Bunga	82 531	358 236
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	35 935 641	45 936 135
5. Belanja Bantuan Sosial	9 154 307	11 228 500
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	38 109 771	40 088 285
8. Pengeluaran Tidak Terduga	765 998	2 000 000
B. Belanja Langsung	308 184 209	389 596 661
1. Belanja Pegawai	50 776 297	65 327 448
2. Belanja Barang dan Jasa	123 927 427	173 142 855
3. Belanja Modal	133 480 485	151 126 358
C. Pembiayaan Daerah	140 535 043	7 362 507
Jumlah	1 040 700 900	1 056 723 935
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 55 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 114 533 219	1 155 299 380
1.	Pendapatan Asli Daerah	114 793 366	127 126 011
1.1.	Pajak Daerah	17 630 311	24 219 825
1.2.	Retribusi Daerah	23 129 015	10 961 664
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 168 153	2 313 676
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	69 865 887	89 630 846
2.	Dana Perimbangan	790 944 567	853 708 400
2.1.	Bagi Hasil Pajak	34 231 045	23 784 458
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	970 243	836 235
2.3.	Dana Alokasi Umum	678 713 899	768 500 117
2.4.	Dana Alokasi Khusus	77 029 380	60 587 590
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	208 795 286	174 464 969
B.	Pembiayaan Daerah	43 348 857	65 917 437
Jumlah		1 157 882 076	1 221 216 817
*)	Data APBD		

Tabel 56 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	693 474 401	743 853 188
1. Belanja Pegawai	641 585 701	681 236 845
2. Belanja Bunga	93 899	67 260
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	6 486 700	9 391 000
5. Belanja Bantuan Sosial	5 738 100	5 414 800
6. Belanja Bagi Hasil	54 134	45 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	39 515 867	43 948 283
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	3 750 000
B. Belanja Langsung	351 903 303	476 590 024
1. Belanja Pegawai	38 611 365	27 708 543
2. Belanja Barang dan Jasa	188 804 914	247 554 298
3. Belanja Modal	124 487 024	201 327 183
C. Pembiayaan Daerah	112 504 372	773 605
Jumlah	1 157 882 076	1 221 216 817
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 57 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 344 382 614	1 353 366 632
1.	Pendapatan Asli Daerah	97 951 208	92 422 000
1.1.	Pajak Daerah	18 171 989	29 984 000
1.2.	Retribusi Daerah	20 128 359	18 849 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 716 178	8 226 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	49 934 682	35 362 500
2.	Dana Perimbangan	965 594 442	1 030 360 248
2.1.	Bagi Hasil Pajak	43 667 708	26 099 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 894 482	1 432 000
2.3.	Dana Alokasi Umum	827 163 222	931 426 998
2.4.	Dana Alokasi Khusus	92 869 030	71 402 250
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	280 836 964	230 584 384
B.	Pembiayaan Daerah	70 084 514	137 560 305
Jumlah		1 414 467 128	1 490 926 937
*)	Data APBD		

Tabel 58 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemalang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	862 001 113	952 785 493
1. Belanja Pegawai	765 649 129	841 388 901
2. Belanja Bunga	213 717	184 900
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	26 946 382	31 707 597
5. Belanja Bantuan Sosial	12 948 250	15 620 100
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	55 004 994	62 293 572
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 238 641	1 590 423
B. Belanja Langsung	334 451 882	523 504 190
1. Belanja Pegawai	45 622 652	44 679 310
2. Belanja Barang dan Jasa	160 462 511	190 820 372
3. Belanja Modal	128 366 719	288 004 508
C. Pembiayaan Daerah	218 014 133	14 637 254
Jumlah	1 414 467 128	1 490 926 937

*) *Data APBD*

Tabel 59 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 354 747 859	1 421 102 386
1.	Pendapatan Asli Daerah	118 741 620	124 014 004
1.1.	Pajak Daerah	25 223 739	40 404 821
1.2.	Retribusi Daerah	17 145 744	19 769 725
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 462 611	4 965 207
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	66 909 526	58 874 251
2.	Dana Perimbangan	990 985 677	1 069 037 617
2.1.	Bagi Hasil Pajak	47 754 851	31 746 445
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 107 042	7 189 956
2.3.	Dana Alokasi Umum	860 568 434	957 576 306
2.4.	Dana Alokasi Khusus	74 555 350	72 524 910
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	245 020 562	228 050 765
B.	Pembiayaan Daerah	113 515 123	67 547 517
Jumlah		1 468 262 982	1 488 649 903
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 60 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	847 847 020	946 442 730
1. Belanja Pegawai	767 488 513	841 204 985
2. Belanja Bunga	53 125	60 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	20 781 195	44 758 245
5. Belanja Bantuan Sosial	9 586 949	12 172 300
6. Belanja Bagi Hasil	52 504	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	46 203 655	44 247 200
8. Pengeluaran Tidak Terduga	3 681 079	4 000 000
B. Belanja Langsung	499 515 401	528 568 485
1. Belanja Pegawai	28 446 943	38 668 526
2. Belanja Barang dan Jasa	167 753 423	266 969 817
3. Belanja Modal	303 315 035	222 930 142
C. Pembiayaan Daerah	120 900 561	13 638 688
Jumlah	1 468 262 982	1 488 649 903

*) *Data APBD*

Tabel 61 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 364 590 017	1 680 179 359
1.	Pendapatan Asli Daerah	101 806 857	107 109 416
1.1.	Pajak Daerah	24 104 117	24 447 000
1.2.	Retribusi Daerah	16 587 924	21 253 192
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 209 344	3 218 474
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	57 905 472	58 190 750
2.	Dana Perimbangan	1 123 344 847	1 249 402 776
2.1.	Bagi Hasil Pajak	56 402 796	66 194 684
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 439 703	1 579 682
2.3.	Dana Alokasi Umum	981 051 188	1 098 999 510
2.4.	Dana Alokasi Khusus	84 451 160	82 628 900
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	139 438 313	323 667 167
B.	Pembiayaan Daerah	151 903 068	227 611 304
Jumlah		1 516 493 085	1 907 790 663
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 62 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 006 241 490	1 149 668 341
1. Belanja Pegawai	873 677 199	1 034 522 465
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	150 000
4. Belanja Hibah	42 029 895	22 048 500
5. Belanja Bantuan Sosial	29 151 390	18 280 250
6. Belanja Bagi Hasil	223 861	240 609
7. Belanja Bantuan Keuangan	53 075 116	68 947 995
8. Pengeluaran Tidak Terduga	8 084 029	5 478 522
B. Belanja Langsung	434 247 766	741 328 404
1. Belanja Pegawai	35 175 055	48 234 508
2. Belanja Barang dan Jasa	206 089 362	289 748 849
3. Belanja Modal	192 983 349	403 345 047
C. Pembiayaan Daerah	76 003 829	16 793 918
Jumlah	1 516 493 085	1 907 790 663

*) *Data APBD*

Tabel 63 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	579 389 447	575 857 572
1.	Pendapatan Asli Daerah	90 986 602	79 889 923
1.1.	Pajak Daerah	12 546 890	12 360 860
1.2.	Retribusi Daerah	6 969 707	5 856 181
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 573 784	4 619 307
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	66 896 221	57 053 575
2.	Dana Perimbangan	397 902 090	427 096 088
2.1.	Bagi Hasil Pajak	27 820 128	17 607 664
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	915 959	835 623
2.3.	Dana Alokasi Umum	348 498 193	385 859 241
2.4.	Dana Alokasi Khusus	20 667 810	22 793 560
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	90 500 755	68 871 561
B.	Pembiayaan Daerah	74 902 501	46 970 276
Jumlah		654 291 948	622 827 848
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 64 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	296 610 099	325 273 843
1. Belanja Pegawai	287 833 633	316 994 966
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	6 354 208	4 713 927
5. Belanja Bantuan Sosial	1 592 110	2 564 950
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	0	0
8. Pengeluaran Tidak Terduga	830 148	1 000 000
B. Belanja Langsung	239 738 590	291 754 005
1. Belanja Pegawai	39 442 949	42 035 878
2. Belanja Barang dan Jasa	121 160 067	127 349 884
3. Belanja Modal	79 135 574	122 368 243
C. Pembiayaan Daerah	117 943 259	5 800 000
Jumlah	654 291 948	622 827 848

*) *Data APBD*

Tabel 65 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 239 451 422	1 376 303 271
1.	Pendapatan Asli Daerah	231 672 101	262 905 867
1.1.	Pajak Daerah	151 905 455	168 515 150
1.2.	Retribusi Daerah	55 056 792	58 271 792
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 118 469	5 205 116
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	19 591 385	30 913 809
2.	Dana Perimbangan	710 269 784	722 287 153
2.1.	Bagi Hasil Pajak	80 821 008	20 921 737
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 253 769	3 803 304
2.3.	Dana Alokasi Umum	595 222 827	659 647 382
2.4.	Dana Alokasi Khusus	28 972 180	37 914 730
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	297 509 537	391 110 251
B.	Pembiayaan Daerah	129 017 174	55 912 298
Jumlah		1 368 468 596	1 432 215 569
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 66 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	748 893 839	834 997 569
1. Belanja Pegawai	663 857 081	719 173 171
2. Belanja Bunga	2 630 069	3 724 526
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	81 484 900	108 369 356
5. Belanja Bantuan Sosial	91 500	1 040 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	690 515	690 516
8. Pengeluaran Tidak Terduga	139 774	2 000 000
B. Belanja Langsung	396 277 058	567 672 799
1. Belanja Pegawai	38 677 573	54 890 565
2. Belanja Barang dan Jasa	171 449 192	247 864 099
3. Belanja Modal	186 150 293	264 918 135
C. Pembiayaan Daerah	223 297 699	29 545 201
Jumlah	1 368 468 596	1 432 215 569

*) Data APBD

Tabel 67 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	662 323 845	578 436 686
1.	Pendapatan Asli Daerah	77 798 871	67 830 275
1.1.	Pajak Daerah	18 695 208	13 881 553
1.2.	Retribusi Daerah	10 185 796	8 516 399
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 386 256	3 690 606
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	45 531 611	41 741 717
2.	Dana Perimbangan	387 037 577	419 957 239
2.1.	Bagi Hasil Pajak	32 771 843	32 381 540
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	915 958	845 422
2.3.	Dana Alokasi Umum	325 710 016	358 331 867
2.4.	Dana Alokasi Khusus	27 639 760	28 398 410
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	197 487 397	90 649 172
B.	Pembiayaan Daerah	96 244 091	78 607 232
Jumlah		758 567 936	657 043 918
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 68 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	312 275 381	348 466 137
1. Belanja Pegawai	288 483 090	334 162 094
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	15 823 569	11 703 610
5. Belanja Bantuan Sosial	498 857	393 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	974 939	846 763
8. Pengeluaran Tidak Terduga	6 494 926	1 360 670
B. Belanja Langsung	239 359 464	306 877 781
1. Belanja Pegawai	20 832 316	28 459 332
2. Belanja Barang dan Jasa	93 621 868	114 847 150
3. Belanja Modal	124 905 280	163 571 299
C. Pembiayaan Daerah	206 933 091	1 700 000
Jumlah	758 567 936	657 043 918

*) *Data APBD*

Tabel 69 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	2 533 676 149	2 421 734 352
1.	Pendapatan Asli Daerah	780 969 273	714 026 932
1.1.	Pajak Daerah	598 872 260	524 079 524
1.2.	Retribusi Daerah	84 877 261	109 978 678
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 777 319	6 872 760
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	90 442 433	73 095 970
2.	Dana Perimbangan	1 165 886 789	1 201 036 809
2.1.	Bagi Hasil Pajak	155 212 231	96 500 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 537 732	557 500
2.3.	Dana Alokasi Umum	936 865 926	1 054 002 569
2.4.	Dana Alokasi Khusus	72 270 900	49 976 740
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	586 820 087	506 670 611
B.	Pembiayaan Daerah	207 718 809	252 189 105
Jumlah		2 741 394 958	2 673 923 457
*)	Data APBD		

Tabel 70 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 125 173 880	1 208 260 762
1. Belanja Pegawai	1 085 378 492	1 183 652 745
2. Belanja Bunga	723 905	1 000 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	30 708 338	14 267 500
5. Belanja Bantuan Sosial	7 485 437	3 551 950
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	788 567	788 567
8. Pengeluaran Tidak Terduga	89 141	5 000 000
B. Belanja Langsung	928 194 155	1 448 762 695
1. Belanja Pegawai	129 902 914	139 505 962
2. Belanja Barang dan Jasa	446 437 459	590 085 663
3. Belanja Modal	351 853 782	719 171 070
C. Pembiayaan Daerah	688 026 923	16 900 000
Jumlah	2 741 394 958	2 673 923 457

*) Data APBD

Tabel 71 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	614 166 688	616 878 575
1.	Pendapatan Asli Daerah	91 205 776	79 069 124
1.1.	Pajak Daerah	30 601 960	26 101 275
1.2.	Retribusi Daerah	17 720 265	17 000 724
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 840 895	3 799 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	40 042 656	32 168 125
2.	Dana Perimbangan	410 000 287	451 680 727
2.1.	Bagi Hasil Pajak	34 567 253	27 793 665
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	915 958	848 044
2.3.	Dana Alokasi Umum	347 390 356	384 489 368
2.4.	Dana Alokasi Khusus	27 126 720	38 549 650
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	112 960 625	86 128 724
B.	Pembiayaan Daerah	46 191 966	28 824 352
Jumlah		660 358 654	645 702 927
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 72 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	301 397 064	346 199 792
1. Belanja Pegawai	261 821 476	299 391 919
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	15 782 825	14 033 810
5. Belanja Bantuan Sosial	686 300	10 693 260
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	23 106 463	19 580 803
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 500 000
B. Belanja Langsung	260 211 927	292 774 761
1. Belanja Pegawai	35 031 983	49 385 311
2. Belanja Barang dan Jasa	121 674 065	124 611 150
3. Belanja Modal	103 505 879	118 778 300
C. Pembiayaan Daerah	98 749 663	6 728 374
Jumlah	660 358 654	645 702 927

*) *Data APBD*

Tabel 73 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Penerimaan		2012	2013 *)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	650 805 264	647 638 895
1.	Pendapatan Asli Daerah	156 663 029	148 201 545
1.1.	Pajak Daerah	29 255 085	35 304 432
1.2.	Retribusi Daerah	19 825 519	17 450 250
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 570 754	2 062 293
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	103 011 671	93 384 570
2.	Dana Perimbangan	394 762 935	420 018 613
2.1.	Bagi Hasil Pajak	28 473 142	15 025 204
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	915 958	819 516
2.3.	Dana Alokasi Umum	334 819 065	370 642 983
2.4.	Dana Alokasi Khusus	30 554 770	33 530 910
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	99 379 300	79 418 737
B.	Pembiayaan Daerah	73 316 828	44 722 831
Jumlah		724 122 092	692 361 726
*)	<i>Data APBD</i>		

Tabel 74 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2012-2013

Jenis Pengeluaran	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	321 641 669	355 422 476
1. Belanja Pegawai	302 045 014	329 208 619
2. Belanja Bunga	185 797	141 737
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	4 652 879	13 220 787
5. Belanja Bantuan Sosial	14 065 400	10 315 322
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	536 010	536 011
8. Pengeluaran Tidak Terduga	156 569	2 000 000
B. Belanja Langsung	265 045 626	335 525 406
1. Belanja Pegawai	35 966 078	40 059 443
2. Belanja Barang dan Jasa	155 775 104	178 835 155
3. Belanja Modal	73 304 444	116 630 808
C. Pembiayaan Daerah	137 434 797	1 413 844
Jumlah	724 122 092	692 361 726
*) <i>Data APBD</i>		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412802, 8412804 Fax. (024) 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> Email: bps3300@bps.go.id

ISBN 978-602-0916-22-4



9 786020 916224